

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perekonomian akan menimbulkan kenaikan harga-harga dan memicu terjadinya inflasi apabila tidak dapat dikontrol dengan baik, yaitu keadaan moneter yang kerap kali dialami oleh negara maju maupun negara berkembang. Perekonomian suatu negara selalu menghadapi naik turun pada inflasi dan bertujuan untuk memperoleh perkembangan perekonomian lebih cepat. Taraf kesejahteraan sebagian besar masyarakat akan menurun jika inflasi tetap berfluktuatif. Hal ini akan mempengaruhi berbagai kegiatan perekonomian seperti investasi produktif akan berkurang, ekspor menurun, dan meningkatkan impor. Akhirnya berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat menuju ke arah positif (Luwihadi & Arka, 2017).

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga (barang maupun jasa) secara keseluruhan. Selama inflasi, sebagian besar harga termasuk harga input seperti upah cenderung naik secara bersamaan, dan harga input menentukan pendapatan pekerja dan pendapatan pemilik modal dan tanah. Jadi inflasi dengan sendirinya tidak serta merta mengurangi daya beli seseorang. Jika pendapatan tetap dan harga naik, kemampuan untuk membeli barang dan jasa turun secara proporsional (Case et al., 2017).

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa inflasi di Indonesia Sumatera Barat, Bali, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara fluktuatif. Lalu inflasi tertinggi masing masing daerah terjadi yaitu Sumatera barat pada 2022 Q2 sebesar 8,49%, Bali pada 2022 Q3 sebesar 6,85%, DKI Jakarta pada 2022 Q3 sebesar 4,61, DIY Yogyakarta pada 2022 Q3 sebesar 6,81, dan Sulawesi Tenggara pada 2022 Q3 sebesar 9,85.

Inflasi yang berfluktuasi ditimbulkan oleh berbagai faktor yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk mengendalikan laju inflasi yang terjadi. Penyebab terjadinya peningkatan inflasi diantaranya adalah terdapatnya desakan dari sisi *demand (demand pull inflation)*, dari sisi *supply (cost push inflation)*, dan ekspektasi inflasi (Suseno & Astiyah, 2009). Faktor pertama, *cost push inflation*

disebabkan oleh meningkatnya ongkos produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Faktor kedua, *demand pull inflation* yang terjadi ketika jumlah uang beredar meningkat dalam jangka pendek, permintaan agregat juga meningkat. Terlebih lagi, ketika dalam jangka pendek jumlah uang beredar bertambah menimbulkan suku bunga menurun dan meningkatnya jumlah konsumsi dan investasi. Faktor ketiga, ekspektasi inflasi yang disebabkan oleh pelaku ekonomi dan perilaku masyarakat yang menggunakan angka inflasi yang diharapkan, yang dapat bersifat adaptif atau progresif, ketika mengambil keputusan mengenai kegiatan ekonomi. Dari berbagai faktor yang menyebabkan inflasi, maka pada penelitian ini memilih beberapa faktor yang dapat ditambahkan menjadi variabel, yaitu BI-rate dan PDB.

Tabel 1.1 Data Inflasi Indonesia & 5 Provinsi 2018 Q4 – 2023 Q4

Tahun, Q	Indonesia	Sumatera Barat	Bali	DKI Jakarta	DIY Yogyakarta	Sulawesi Tenggara
2018 Q4	3,13	2,60	3,13	3,27	2,66	9,43
2019 Q1	2,48	1,94	1,85	3,01	2,61	9,35
2019 Q2	3,28	3,61	2,14	3,49	3,11	8,27
2019 Q3	3,39	3,53	2,54	3,72	2,99	9,33
2019 Q4	2,72	1,67	2,38	3,23	2,77	9,44
2020 Q1	2,96	2,09	3,04	3,21	2,95	9,36
2020 Q2	2,96	0,18	2,18	2,18	1,95	9,19
2020 Q3	1,42	0,16	0,95	1,76	1,66	9,42
2020 Q4	1,68	2,11	0,80	1,59	1,40	9,55
2021 Q1	1,37	1,78	0,84	1,11	1,43	9,46
2021 Q2	1,33	1,74	0,58	1,01	1,50	9,55
2021 Q3	1,60	1,75	1,40	1,14	1,58	9,43
2021 Q4	1,87	1,44	2,07	1,53	2,29	9,64
2022 Q1	2,64	3,24	2,41	2,00	2,95	9,71
2022 Q2	4,35	6,60	5,75	2,88	5,33	9,74
2022 Q3	5,95	8,49	6,85	4,61	6,81	9,85
2022 Q4	5,51	7,43	5,81	4,21	6,49	9,82
2023 Q1	4,97	5,97	5,46	3,69	6,11	9,64
2023 Q2	3,52	2,95	3,08	3,20	4,20	9,75
2023 Q3	2,28	1,94	2,40	2,08	3,30	9,68
2023 Q4	2,61	2,47	2,77	2,28	3,17	9,65

Sumber : www.bps.go.id dan www.bi.go.id

Selanjutnya, Teori kuantitas uang berawal dari karya para ahli teori moneter awal, termasuk filsuf dan ekonom David Hume (1711–1776) yang merupakan

satu diantara teori yang menjelaskan penyebab terjadinya inflasi atau peningkatan harga. Titik tolak teori kuantitas uang adalah pemahaman masyarakat tentang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang diperdagangkan, semakin banyak uang yang dimiliki. Oleh karena itu, teori kuantitas uang menegaskan bahwa sebagai pihak yang mengontrol jumlah uang beredar, bank sentral memiliki kendali penuh atas tingkat inflasi. Tingkat harga akan stabil jika bank sentral menstabilkan jumlah uang beredar. Tingkat harga akan naik dengan cepat jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat (Mankiw, 2019).

Jumlah uang beredar (JUB) adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian dan ditentukan oleh sistem perbankan dan kebijakan bank sentral. M1 adalah mata uang ditambah giro, cek perjalanan, dan simpanan lain yang dapat diperiksa. Sedangkan M2 adalah M1 ditambah reksadana pasar uang ritel, tabungan (termasuk deposito pasar uang), dan deposito kecil (Mankiw, 2019). Banyaknya uang yang beredar mempengaruhi sistem pembayaran karena sistem pembayaran menjadi alat tukar pada setiap transaksinya. Sistem pembayaran adalah suatu sistem aturan, lembaga, dan tata cara pergerakan dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul akibat gangguan perekonomian. Ada dua jenis sistem pembayaran: sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai.

Sistem pembayaran non-tunai saat ini muncul sebagai alternatif penggunaan uang untuk kegiatan bertransaksi. Selain efisien dan efektif, pembayaran non-tunai juga mengurangi tindak kejahatan seperti pemalsuan uang dan pencurian. Penggunaan pembayaran sangat membantu dan memudahkan ketika melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, karena tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk biaya angkut dan sebagainya.

Kemudahan melakukan *cashless* berdampak pada percepatan perputaran uang. Nilai tukar mata uang adalah nilai tahunan rata-rata di mana satu unit mata uang digunakan untuk membeli jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (perputaran moneter). Meskipun jumlah transaksi tunai di masyarakat mengalami penurunan, namun intensitas peredaran uang tetap tinggi. Namun peningkatan daya peredaran uang dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak baru, yakni inflasi (Aprilianto & Muslikhati, 2022). Alat

pembayaran selain tunai seperti kartu kredit dan ATM/debit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah uang beredar (M1) dan mempengaruhi peredaran uang. Inflasi terjadi ketika aliran uang tidak dapat dikendalikan dengan baik. (Fadillah & Munawar, 2019). Untuk mendukung penerapan sistem pembayaran nontunai di Indonesia, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, lancar dan aman untuk memperbaiki sistem keuangan lingkungan negara agar berfungsi secara efektif dan efisien (Bank Indonesia, 2020).

Perkembangan atas nilai transaksi non tunai di Sumatera Barat, Bali, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi selama periode 2018 Q3 – 2023 Q4. Nilai Transaksi Non Tunai tertinggi tercatat terjadi di Jakarta pada 2019 Q3 dengan nilai sebesar Rp 847365,339 miliar. Sedangkan nilai transaksi terendah terjadi di Sulawesi Tenggara pada 2019Q2 dengan nilai sebesar Rp 3903,534 miliar. Nominal dari transaksi non tunai di kelima provinsi ini memiliki trend yang stasioner. Jika dibandingkan dengan inflasi, pergerakan nominal transaksi non tunai tidak sama. Hal ini tidak sesuai dengan teori kuantitas uang yang menjelaskan bahwa inflasi hanya dapat terjadi jika JUB meningkat, dan hal ini akan terjadi jika JUB tidak meningkat. Pergerakan transaksi non tunai sebagai bagian dari jumlah uang beredar tidak terdapat pergerakan yang sama pada inflasi

Selain mengatur keberlangsungan sistem pembayaran, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral RI melakukan penetapan *BI rate* sebagai suku bunga acuan. Hal ini dilakukan agar sasaran inflasi yang ditetapkan tercapai. Suku bunga Bank Indonesia (SBI) merupakan pedoman suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk kebijakan keuangan, yang berlaku bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pengelolaan moneter. Dampak perubahan nilai BI-Rate tidak hanya pada kenaikan dan penurunan harga, namun juga pada perubahan harga barang dan jasa (Himmati & Sari, 2021). Kehadiran transaksi non-tunai juga mendorong masyarakat untuk menahan diri dari transaksi tunai, yang pada gilirannya menyebabkan lebih banyak orang menyimpan dana di rekening mereka. Efek multiplier ini

menyebabkan lebih banyak dana masyarakat yang tersimpan dalam bentuk non-tunai di rekening bank. Hal ini berdampak pada penumpukan likuiditas yang memaksa bank untuk mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Penetapan cadangan wajib dan penerapan suku bunga mempengaruhi efek pengganda dari pencucian uang, yang pada gilirannya mempengaruhi jumlah uang beredar (Aprilianto & Muslikhati, 2022).

Tingkat suku bunga BI rate tercatat selama tahun 2018 Q4 – 2023 Q4 mengalami fluktuasi. Menurut data yang dirilis oleh BI selama beberapa tahun terakhir, pada 2021 Q1 Bank Indonesia menurunkan suku bunga menjadi 3,5% dan akan menahannya lebih lama agar lonjakan jumlah uang beredar dan potensi kenaikan inflasi dapat teratasi. Sedangkan, pada 2023 triwulan 4 Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 6,00% dan diperkirakan perekonomian global tumbuh sebesar 3,1%.

Terakhir, Produksi Domestik Bruto (PDB) suatu perekonomian yang menunjukkan akumulasi output yang dikonsumsi dan diinvestasikan, dan seluruh potensi perekonomian untuk memenuhi permintaan agregat disebut penawaran agregat (Suhatmi & Sulistyawati, 2023). Sedangkan untuk tingkat wilayah regional disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Peningkatan jumlah uang beredar yang melebihi pertumbuhan PDB dapat menyebabkan inflasi. Peningkatan nilai transaksi dengan *e-money* di Indonesia berhubungan langsung dengan komponen jumlah uang beredar. Meningkatnya penggunaan *e-money* dapat mempengaruhi komponen M1 dan M2, tergantung dari jenis *e-money* yang digunakan. Apabila peningkatan transaksi *e-money* melebihi pertumbuhan PDB, maka potensi peningkatan permintaan barang dan jasa dapat meningkatkan tekanan terhadap tingkat harga, karena peningkatan jumlah uang beredar tidak diimbangi dengan peningkatan produksi (Sihombing et al., 2023). (Martanto et al., 2021) menggunakan alat analisis Error Correction Model untuk menyelidiki tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 1998 hingga 2020. Penelitian tersebut menemukan bahwa PDB Indonesia berdampak signifikan pada inflasi secara bersamaan dan parsial, dan PDB berpengaruh signifikan dan positif. Namun dalam jangka pendek, PDB tidak signifikan terhadap inflasi.

Pada tahun 2020 Sumatera Barat, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara, PDRB ADHK Pengeluaran keempat provinsi tersebut negatif. Sedangkan PDRB provinsi Bali berada di posisi negatif pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang negatif karena dampak Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi berdampak pada permintaan barang dan jasa secara umum.

Dari banyaknya faktor yang mempengaruhi inflasi penulis mengambil sejumlah faktor yang diduga mempengaruhi inflasi, yaitu BI rate, PDRB, dan Transaksi Pembayaran Non-Tunai. Maka, akan dilakukan penelitian mengenai topic tersebut, hubungan Transaksi Pembayaran Non-Tunai, PDRB, dan BI rate terhadap inflasi di Sumatera Barat, Bali, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara. Penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan pengambil keputusan baik untuk mengendalikan inflasi maupun sistem pembayaran di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkembangan nilai transaksi pembayaran non tunai di Sumatera Barat, Bali, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara?
- b. Bagaimana hubungan variabel-variabel Transaksi Pembayaran Non-Tunai, BI-rate, dan PDRB terhadap inflasi di Sumatera Barat, Bali, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara?

1.3 Tujuan Utama Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan transaksi pembayaran non tunai Sumatera Barat, Bali, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara
- b. Untuk mengetahui hubungan antara Transaksi Pembayaran Non-Tunai, BI-rate, dan PDRB terhadap inflasi di Sumatera Barat, Bali, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara